

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN  
NELAYAN DESA MUARA GADING MAS  
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR**

**(Tesis)**

**Oleh**

**BAYU SAPUTRO  
NPM 2120041001**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN WILAYAH PESISIR DAN LAUT  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN NELAYAN PESISIR DESA MUARA GADING MAS KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR**

**Oleh**

**BAYU SAPUTRO**

Kesejahteraan nelayan sangat bergantung pada sumberdaya pesisir dan laut. Tingkat kesejahteraan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yaitu tingkat perekonomian, pendidikan dan kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi kesejahteraan nelayan dan implementasi kebijakan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur. Pengumpulan data pada penelitian dilakukan menggunakan metode wawancara kuisioner dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi kesejahteraan nelayan di desa tersebut harus ditingkatkan. Implementasi berkaitan dengan kebijakan belum optimal, ditandai dengan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan serta kesejahteraan di wilayah tersebut. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi berkaitan dengan kebijakan baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang indikator kesejahteraan rakyat yaitu tingkat kesehatan, pendidikan dan juga perekonomian. Kolaborasi antar *stakeholder* penting untuk dilakukan guna mendorong percepatan pembangunan di wilayah pesisir. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan harus melakukan kajian analisis implementasi kebijakan dan program sesuai dengan kajian teoritis dan praktis yang ada di wilayah pesisir Muara Gading Mas.

Kata kunci: kesejahteraan, kebijakan, nelayan.

## **ABSTRACT**

### **COASTAL FISHERMAN WELFARE DEVELOPMENT POLICY IMPLEMENTATION OF MUARA GADING MAS VILLAGE LABUHAN MARINGGAI SUB-DISTRICT, EAST LAMPUNG**

**By**

**BAYU SAPUTRO**

The welfare of fishermen is very dependent on coastal and marine resources. The level of welfare can be seen from the Human Development Index (IPM), namely the level of the economy, education and health. The purpose of this study was to determine the condition of fishermen's welfare and implementation of policies in Muara Gading Mas Village, Labuhan Maringgai District, East Lampung Regency. Data collection in this study was carried out using questionnaire interviews and in-depth interviews. Data analysis uses a qualitative descriptive method. The results of the research show that the condition of fishermen's welfare in the village must be improved. Implementation related to policies has not been optimal, marked by a lack of educational and welfare facilities and infrastructure in the region. This prompted the government to carry out evaluations related to policies, both the central government and regional governments, regarding indicators of people's welfare, namely the level of health, education and also the economy. Collaboration between stakeholders is important to do in order to accelerate development in coastal areas. In addition, the East Lampung Regency Government through the Maritime Affairs and Fisheries Service must carry out an analysis of the implementation of policies and programs in accordance with theoretical and practical studies in the coastal area of Muara Gading Mas.

Keywords: welfare, policy, fishermen.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN  
NELAYAN PESISIR DESA MUARA GADING MAS  
KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR**

**Oleh**

**BAYU SAPUTRO**

**Tesis**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
MAGISTER SAINS**

**Pada**

**Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut  
Pascasarjana Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN WILAYAH PESISIR DAN LAUT  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN  
KESEJAHTERAAN NELAYAN DESA MUARA  
GADING MAS KECAMATAN LABUHAN  
MARINGGAI LAMPUNG TIMUR**

Nama Mahasiswa : **Bayu Saputro**

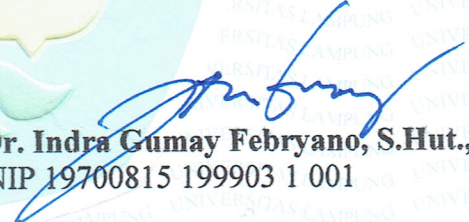
Nomor Pokok Mahasiswa : 2120041001

Program Studi : Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut


Fakultas : Pascasarjana



  
**Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si**  
NIP 19650501 198902 1 001

  
**Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si**  
NIP 19700815 199903 1 001

**2. Ketua Program Studi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut  
Universitas Lampung**

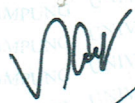
  
**Dr. Supono, S.Pi., M.Si**  
NIP 197010022005011002



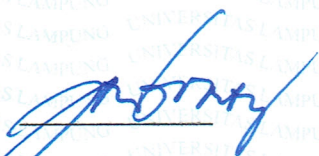
**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

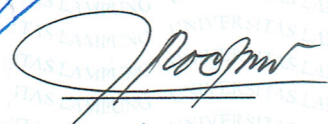
**Ketua : Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si.**



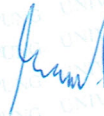
**Sekretaris : Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si.**



**Penguji  
Bukan Pembimbing : Dr. Erna Rochana, M.Si.**


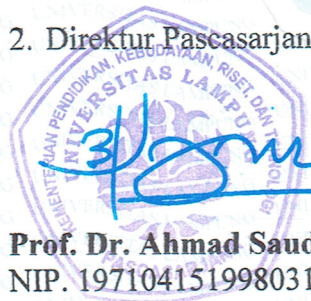


**Anggota : Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.**



**2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung**

**Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M. T.**  
**NIP. 197104151998031005**

**Tanggal Lulus Ujian Tesis: 7 Desember 2022**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul: **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DESA MUARA GADING MAS KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau mengutip atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 7 Desember 2022  
Yang membuat pernyataan,



Bayu Saputro  
NPM 2120041001



## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Bayu Saputro dilahirkan di Tanjung Karang, Provinsi Lampung, pada tanggal 28 Agustus 1997, sebagai anak tunggal. Anak dari Bapak Sugianto, dan Ibu Patmawati. Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Dewi Sartika diselesaikan tahun 2003, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 1 Murnijaya, Tulang Bawang Barat pada tahun 2009, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMPN 1 Tumijajar pada tahun 2012, Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Tumijajar pada tahun 2015. Penulis memperoleh gelar Sarjana di Jurusan Perikanan dan Kelautan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Pada tahun 2020, penulis dinyatakan lolos Pascasarjana, Prodi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut, Universitas Lampung. Penulis pernah mengikuti seminar internasional dengan tema "Hasankey" dengan menghasilkan karya ilmiah berupa artikel yang terbit pada prosiding.



## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan.

Tesis dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN NELAYAN DESA MUARA GADING MAS KECAMATAN LABUHAN MARINGGAI LAMPUNG TIMUR”** adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister di Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut di Universitas Lampung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Supono, S.Pi., M.Si., selaku Ketua Prodi Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut;
3. Bapak Dr. Ir. Abdullah Aman Damai, M.Si. pembimbing utama atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis;
4. Bapak Dr. Indra Gumay Febryano, S.Hut., M.Si., selaku pembimbing kedua atas kesediaannya memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis;
5. Ibu Dr. Erna Rochana, M.Si. selaku penguji utama pada rangkaian penyelesaian tesis. Terima kasih untuk masukan dan saran-saran pada proses penulisan tesis;
6. Ibu Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si. selaku penguji kedua atas masukan dan saran-saran untuk penulis menyelesaikan tesis;

7. Bapak dan Ibu staf administrasi Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung;
8. Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Lampung Timur;
9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Timur;
10. Sekretaris Desa Muara Gading Mas;
11. Keluarga Magister Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut angkatan 2021 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis;

Bandar Lampung, 7 Desember 2022

**Bayu Saputro**

**Kupersembahkan  
Dengan  
Rasa Bangga  
Sebuah  
Karya Ilmiah ini  
Untuk  
Bapak dan Ibu Tersayang**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang dan Masalah .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	6
1.3. Tujuan Penelitian .....	7
1.4. Kerangka Pemikiran .....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	8
2.1. Masyarakat Pesisir .....	8
2.2. Kesejahteraan .....	9
2.2.1 Kesejahteraan .....	9
2.2.2 Kemiskinan .....	10
2.2.3 Perekonomian .....	13
2.2.4 Pendidikan .....	16
2.2.5 Kesehatan .....	20
2.3. Implementasi Kebijakan .....	21
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	24
3.1. Waktu dan Tempat .....	24
3.2. Alat dan Bahan .....	25
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	25
3.4. Unit Analisis dan Penentuan Informan .....	26
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	26
3.6. Teknik Analisis data .....	27
3.7. Analisis Data .....	29
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	31
4.1. Demografi Desa Muara Gading Mas .....	31
4.2. Kondisi Kesejahteraan Nelayan .....	33
4.2.1. Perekonomian .....	33
4.2.2. Pendidikan .....	37
4.2.3. Kesehatan .....	42
4.3. Implementasi Kebijakan .....	48
4.3.1. Perekonomian .....	50
4.3.2. Pendidikan .....	55



4.3.3. Kesehatan .....	57
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>59</b>
5.1. Simpulan .....	59
5.2. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>67</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka pemikiran .....	7
2. Lokasi penelitian .....	24
3. Teknik analisis data.....	28
4. Kantor Desa.....	32
5. Puskesmas pembantu .....	44
6. Kondisi TPI.....	52
7. Kondisi sekolah.....	55
8. Kegiatan nelayan.....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Mata Pencaharian Masyarakat .....	32
2. Pendapatan Nelayan .....	34
3. Pengeluaran Nelayan .....	35
4. Tingkat Pendidikan .....	38
5. Sarana Prasarana Pendidikan Masyarakat .....	41
6. Sarana Kesehatan Nelayan .....	43
7. Sarana Kesehatan Nelayan .....	44
8. Jaminan Pelayanan Kesehatan .....	45

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang dan Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagai konsekuensinya, isu pengembangan potensi sumber daya di wilayah pesisir menjadi isu sentral agar sumber daya yang ada dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Selain itu, wilayah pesisir memiliki arti strategis karena daerah tersebut merupakan pertemuan antara darat dan laut yang memiliki potensi sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat melimpah. Sebagaimana secara normatif tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat” dan “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Berbagai potensi dapat dikembangkan di wilayah kepulauan, seperti potensi sumber daya hayati, sumber daya mineral serta energi, potensi industri dan jasa maritim, potensi transportasi laut dan jasa lingkungan, dan lain sebagainya. Potensi lestari perikanan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun sedangkan ekonomi sumber daya perikanan dan kelautan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diprediksi mencapai US\$82 miliar per tahun (Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016).

Sementara itu, untuk sumber daya mineral dan energi, berdasarkan hasil penelitian BPPT (Kusumastanto, 2000) dari 60 cekungan minyak yang terkandung dalam



alam Indonesia, sekitar 70% atau sekitar 40 cekungan terdapat di laut. Dari 40 cekungan itu 10 cekungan telah diteliti secara intensif, 11 baru diteliti sebagian, sedangkan 29 belum terjamah sama sekali. Diperkirakan ke-40 cekungan itu berpotensi menghasilkan 106,2 miliar barel setara minyak, namun baru 16,7 miliar barel yang diketahui dengan pasti, 7,5 miliar barel di antaranya sudah dieksploitasi. Sisanya sebesar 89,5 miliar barel berupa kekayaan yang belum terjamah. Potensi wilayah pesisir yang besar tersebut dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi nasional. Namun, hingga saat ini berbagai potensi tersebut belum digali secara optimal dan banyak permasalahan yang muncul di wilayah pesisir.

Secara garis besar, permasalahan wilayah pesisir mencakup tiga aspek, yakni: sosial- ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Dari aspek sosial-ekonomi, data yang ada menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nelayan di Indonesia masih sangat mengkhawatirkan, sebesar 32,4% (Purnama, 2016). Kemiskinan nelayan pada umumnya disebabkan beberapa faktor, antara lain: pendidikan yang rendah, peran lembaga ekonomi yang masih belum optimal memberdayakan nelayan, kebiasaan nelayan yang kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang, kepemilikan modal, serta teknologi yang digunakan masih bersifat tradisional (Hamdani, 2013).

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan luasan yang sangat besar di Provinsi Lampung memiliki sumber daya sangat potensial seperti ikan, udang, terumbu karang, lobster, kepiting, ranjungan, bahan tambang, mineral, dan wisata serta jasa lingkungan. Kekayaan serta sumberdaya laut memiliki nilai ekonomi strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Potensi pesisir lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota antara lain mangrove, padang lamun, dan rumput laut. Potensi yang tinggi harus sesuai dengan pemanfaatan yang optimal (Arkham *et al.*, 2018). Wilayah-wilayah pesisir membutuhkan rencana pembangunan terintegrasi lintas sektor, administrasi hulu dan hilir.

Wilayah pesisir memiliki potensi yang kaya dan unik serta bernilai ekonomi tinggi. Saat ini gejala yang cukup memprihatinkan telah muncul di wilayah pesisir, yakni pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir yang mengancam kelestarian dan sumber daya pesisir seperti pencemaran, penangkapan ikan dengan berlebihan, eksploitasi, degradasi ekosistem pesisir, konflik penggunaan lahan, dll (Fitriansyah, 2012). Kondisi ini mengancam kesejahteraan nelayan serta masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya pesisir. Peran serta masyarakat memiliki arti penting dalam pengelolaan wilayah pesisir, yakni untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang tepat, berdayaguna serta berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, wilayah pesisir memiliki kompleksitas tinggi, bersifat dinamik, dan rentan terhadap berbagai tekanan. Karakteristik ruang daratan dan perairan di wilayah pesisir berbeda, namun saling terkait secara ekologi, ekonomi, dan sosial. Di sisi lain, wilayah pesisir memiliki sumberdaya yang beragam dan jasa lingkungan, sehingga dapat dilakukan eksploitasi secara berlebih (Damai *et al.*, 2012).

Bila masyarakat dapat mengoptimalkan potensinya maka akan bisa maksimal pula kontribusinya untuk kesejahteraan bersama. Mereka dapat mempunyai akses pada sumber daya ekonomi serta dapat memanfaatkan pengetahuan, keterampilan, serta kesehatannya untuk bekerja agar dapat hidup dengan layak. Proses pembangunan harus dapat merealisasikan harapan-harapan tersebut. Fokus pada manusia inilah yang melandasi konsep pembangunan manusia. Pembangunan manusia memiliki tujuan untuk menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sehat, dan produktif (UNDP, 1990). Fokus pendekatan pembangunan manusia lebih ditekankan pada banyaknya pilihan masyarakat yang bebas dan bermartabat. Hal ini secara bersamaan melihat semua isu dalam masyarakat yang meliputi perdagangan, pertumbuhan ekonomi, kebebasan politik, ketenagakerjaan ataupun nilai budaya dari sudut pandang manusia.

Namun demikian pembangunan harus seimbang antara meningkatkan kemampuan dengan memanfaatkan peluang. Proses pembangunan harus bisa menciptakan lingkungan untuk manusia baik sebagai individu, keluarga maupun masyarakat, mengembangkan kemampuannya secara optimal sehingga mempunyai cukup kesempatan (memanfaatkan kemampuannya) untuk dapat hidup yang produktif dan kreatif sesuai kebutuhan dan minatnya. Dengan kata lain, pembangunan manusia tidak hanya terfokus pada pembentukan kemampuan manusia seperti kesehatan yang lebih baik serta pengetahuan dan keterampilan. Tetapi proses pembangunan manusia juga perlu mempertimbangkan pemanfaatan kemampuan tersebut baik untuk bekerja, berlibur, serta kegiatan sosial politik lainnya. Dua sisi pembangunan tersebut harus berkembang secara seimbang. Ketimpangan akan berakibat pemborosan potensi manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia. Konsep pembangunan manusia diukur dengan menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar manusia, yaitu perkonomian, pendidikan dan kesehatan. Ketiga dimensi ini terangkum dalam suatu indeks komposit yang membentuk IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Nikijuluw (2001) Pemerintah sudah menggulirkan program berkaitan dengan pengentasan kemiskinan pada nelayan, yaitu program motorisasi, penerapan sistem rantai dingin, dan protekan 2003 yang merupakan Gerakan Peningkatan Ekspor Perikanan. Namun program tersebut mati seiring dengan bergantinya era pemerintahan. Pengelolaan berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui pendekatan struktural dan pendekatan subyektif, atau bisa dikatakan pendekatan secara kelembagaan dan pendekatan melalui aspek manusia. Menurut Djunaedi (2002) setiap wilayah memiliki perbedaan begitupula dengan masalah yang dihadapi, oleh sebab itu penganannya akan berbeda. Kewenangan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, terbagi dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti pariwisata, lingkungan, tata ruang, pertanian, pertambangan, kehutanan dan sebagainya.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan pesisir pantai yang terisolir hingga masih diyakini sebagai solusi terbaik menyelesaikan persoalan kemiskinan atau keterbelakangan sosial. Sebagaimana konstataasi Bebbington (2000) pemberdayaan dilakukan sebagai proses untuk membuat pihak-pihak marjinal dapat lebih berpartisipasi dalam strategi pembangunan dan distribusi produk yang dihasilkan. Selain itu, juga sebagai alat untuk membuka akses kepada masyarakat yang terpinggirkan terhadap sumberdaya.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan yang paling penting dalam kebijakan publik. Namun, implementasi sering hanya sebagai pelaksanaan. Implementasi kebijakan menjadi penting karena tiap kebijakan tidak punya arti apa-apa apabila tidak terlaksana dengan baik. Kebijakan publik dalam arti umum merupakan alat administrasi dimana para aktor, organisasi, dan prosedur, teknik, serta sumber daya dapat diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan agar mendapatkan dampak/tujuan yang diinginkan. Kebijakan negara adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan demi kepentingan seluruh masyarakat (Suratman, 2017).

Mengenai hal ini Wahab (2002) menerangkan bahwa aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan terdapat dalam implementasi kebijakan. Berdasarkan kondisi tersebut, nelayan dianggap sebagai dasar pembangunan sekaligus implementasi dari pembangunan yang mencirikan *bottom-up* dimana aspirasi masyarakat menjadi acuan dalam semua rencana dan realisasi pembangunan. Dalam situasi ini, masyarakat desa menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat tujuannya yakni membangun kemandirian atau daya pada masyarakat desa, sedangkan pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator. Faktor yang menyebabkan masyarakat berada dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan karena kemiskinan yang sistematis dan minimnya akses pada pendidikan, pelayanan kesehatan serta ekonomi. Kondisi ini diperparah tidak adanya solusi dari pemerintah untuk mengurangi ancaman kemiskinan sehingga berdampak pada kegagalan sejumlah program eliminasi kemiskinan karena kurang mampu memunculkan kearifan lokal dan modal sosial.



Arah pemberdayaan nelayan yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif dalam memprioritaskan kebutuhan masyarakat dalam alokasi anggaran sehingga mampu memanfaatkan potensi yang dimilikinya. Pemberdayaan nelayan umumnya menyangkut pemberian keterampilan, kesempatan, dan pengetahuan (Sopyan, 2014). Kelemahan itu memunculkan persoalan seperti penyelewengan dana yang diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dalam mengelola anggaran sehingga banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya.

Masyarakat pesisir yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan, diperlukan pendekatan langsung kepada masyarakat agar implementasi kebijakan yang dibuat dapat tepat sasaran. Menurut Zainal (2004) kebijakan sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/organisasi yang berkaitan dengan kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan. Tujuan utama dari disusunnya kebijakan pesisir yaitu memperbaiki tingkat kemakmuran dan kesejahteraan nelayan (Chikmawati, 2019). Kesejahteraan pesisir sangat berhubungan dengan empat hal penting yaitu kemiskinan, pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Agar kesejahteraan pesisir menjadi prioritas utama dalam proses pengambilan kebijakan perlu diketahui implementasi kebijakan yang sudah diterapkan pada suatu daerah tertentu. Berdasarkan hal tersebut maka akan diketahui seberapa besar peran kebijakan dalam mengembangkan kesejahteraan nelayan.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi kesejahteraan Nelayan di Desa Muara Gading Mas?
2. Bagaimana implementasi kebijakan kesejahteraan Nelayan Desa Muara Gading Mas?

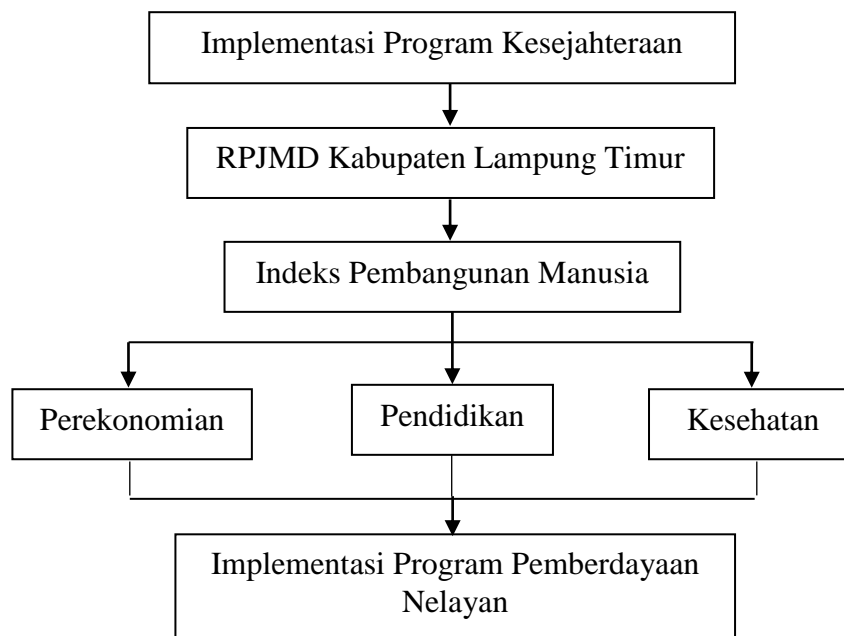
### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Menganalisis kondisi perekonomian di Desa Muara Gading Mas
2. Menganalisis kondisi pendidikan di Desa Muara Gading Mas
3. Menganalisis kondisi kesehatan di Desa Muara Gading Mas

### 1.4. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini disajikan dalam diagram berikut:



Gambar 1. Kerangka pemikiran penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir, terutama nelayan lekat dengan kemiskinan bahkan disebut kelompok miskin diantara yang miskin (Sipahelut, 2010). Menurut Kusumaningrum (2013) bahwa kemiskinan nelayan terkait dengan masalah kompleks baik secara struktural, kultural maupun natural. Menurut Sipahelut (2010) penyebab kemiskinan masyarakat nelayan dapat dikelompokkan menjadi internal dan eksternal. Sebab internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia (SDM), keterbatasan modal dan teknologi, hubungan kerja kurang menguntungkan, kesulitan diversifikasi usaha, ketergantungan terhadap okupasi melaut, dan gaya hidup boros. Adapun sebab eksternal meliputi kebijakan yang berorientasi produktivitas dan parsial, sistem pemasaran yang merugikan, kerusakan ekosistem, peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, penegakan hukum yang lemah, terbatasnya teknologi pengolahan, terbatasnya peluang-peluang kerja non perikanan, kondisi alam dan musim, serta isolasi geografis.

Kebijakan pemerintah menjadi faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir. Sesuai hasil penelitian Syarief (2001) bahwa kebijakan pembangunan kelautan selama ini, cenderung mengarah kepada “produktivitas” memaksimalkan eksploitasi tanpa ada pengendalian. Kebijakan tersebut mengakibatkan beberapa kondisi berupa: a) *overfishing*, perusakan ekologi laut dan pantai, b) kesenjangan dan kemiskinan nelayan tradisional, c) ketergantungan masyarakat nelayan kecil/tradisional terhadap pemodal besar/modern, antara nelayan dan pedagang, antara *pherphery* terdapat *center*, antara masyarakat dengan pemerintah. Menurut Tulungen

(2001) pendekatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir yang dapat menjadi rujukan adalah berbasis pemberdayaan masyarakat. Konsep ini telah menjadi pendekatan utama dalam pengelolaan sumberdaya pesisir di Indonesia sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang desentralistis.

Menurut hasil penelitian Fitriansyah (2012), keberhasilan pemberdayaan di pesisir berhasil dengan adanya kesadaran kepada masyarakat bahwa program yang mereka jalankan bukan semata-mata program dari pemerintah, tetapi juga menjadi program mereka sendiri. Aktor-aktor yang berperan sempurna diantaranya adalah pemerintah daerah sebagai pengarah dan pembina program, masyarakat lokal sebagai pelaksana utama semua kegiatan dan sebagai kelompok yang memfasilitasi hubungan kedua aktor secara terbuka dan transparan. Sementara hasil penelitian Mardjoeki (2012) bahwa butuh adanya kerjasama yang simultan dan lintas sektoral dalam pemberdayaan nelayan. Pendekatan yang paling sesuai dengan kondisi tersebut adalah dengan cara pendekatan partisipatif yaitu suatu pendekatan yang melibatkan kerjasama antara masyarakat setempat dan pemerintah.

## **2.2. Kesejahteraan**

### **2.2.1. Definisi Kesejahteraan**

Sejahtera mempunyai konotasi *wealthy* atau *prosperous*. Masyarakat yang sejahtera berarti secara ekonomi makmur, dengan pembagian yang lebih merata serta adil. Jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, dan kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera terjamin hak-haknya dan berkesempatan sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, serta kebutuhan dasar yang layak. Selain itu, kesejahteraan juga mencakup hidup berdampingan dengan orang lain, selain pemenuhan kebutuhan hidup, juga aktivitas yang bermakna dalam hidup sendiri untuk mencapai tujuan dan menikmati kualitas hidup yang memuaskan. Dengan kata lain, kesejahteraan adalah sebuah bentuk ungkapan/ekspresi kepuasan hidup seseorang serta lebih

lanjut ini akan dapat mempengaruhi tingkat kualitas hidup manusia, masyarakat dan Negara (Lynda, 2009).

Lynda (2009) berpendapat bahwa kesejahteraan dapat dipahami sebagai suatu keadaan dimana individu/masyarakat merasa puas, bahagia dan sehat dengan hidupnya. Kedua kondisi ini seperti dua sisi mata uang dan selalu ada keduanya serta memiliki makna baik dalam menikmati kualitas hidup maupun dalam mengejar cita-cita untuk memuaskan diri. Kesejahteraan bagaikan suatu proses yang dinamis melalui kegiatan interaksi yang terus mengalami perkembangan (*social progress*) namun tidak memperlihatkan wujudnya dan dia hanya sebagai ungkapan ekspresi terhadap kepuasan hidup. Sedangkan Budiharsono (2009) menyatakan bahwa wilayah pesisir merupakan wilayah belakang, sedangkan daerah perkotaan sebagai intinya. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang memproduksi ikan, namun juga dapat dikatakan sebagai wilayah dengan tingkat pendapatan penduduk yang tergolong di bawah garis kemiskinan.

### **2.2.2. Kemiskinan**

Kemiskinan adalah suatu konsep yang serba tidak pasti dan bersifat multidimensional. Kemiskinan bisa bermakna subjektif, sekaligus bermakna objektif. Secara objektif masyarakat miskin tidak hanya ditentukan menurut pendapatannyatidak dapat dikatakan miskin karena pendapatannya, tetapi juga berdasarkan atas kebutuhan beras dan gizi. Namun demikian hal yang terlihat secara objektif tidak miskin itu bisa saja dirasakan sebagai kemiskinan oleh pelakunya, karena adanya perasaan tidak mampu memenuhi kebutuhan ekonominya atau bahkan dengan membandingkan kondisi yang dialami oleh orang lain, yang pendapatannya lebih tinggi darinya (Imron, 2003).

Begitu banyak pengertian tentang kemiskinan. Pada umumnya konsep kemiskinan lebih banyak dikaitkan dengan dimensi ekonomi. Kemiskinan dapat juga dikaitkan dengan dimensi sosial budaya dan sosial politik. Dalam dimensi ekonomi, kemiskinan merupakan bentuk ketidakmampuan suatu keluarga untuk memenuhi segala kebutuhan dasar yang meliputi pangan, sandang, papan dan kesehatan. Hal ini dapat terlihat secara kualitatif pada kondisi pemukiman yang

kumuh, peralatan rumah tangga yang terbatas, kemampuan memenuhi kebutuhan sandang dan kesehatan rendah dan kondisi pendidikan yang belum memadai. Dalam kaitannya dengan dimensi sosial budaya, kemiskinan lebih sulit diukur dan tidak dapat dihitung dengan angka-angka. Dimensi sosial budaya dari kemiskinan dapat dirasakan karena adanya budaya kemiskinan.

Budaya kemiskinan yang demikian akan menjerumuskan masyarakat miskin ke dalam kemiskinan yang lebih dalam, karena menghambat mereka untuk berjuang dalam melawan kemiskinan yang dialami. Adapun dimensi sosial politik, kemiskinan muncul dalam bentuk terpinggirkannya kelompok miskin dalam struktur sosial yang dibawah dan tidak dilibatkannya mereka dalam proses pengambilan keputusan. Hal itu muncul dengan termarginalisasinya kelompok miskin sehingga tidak mempunyai akses, seperti terhadap lembaga keuangan. Begitu pula dalam program-program untuk perbaikan kelompok ini, mereka tidak punya akses untuk berpartisipasi dalam menentukan masa depannya, karena penentuan program biasanya dilakukan oleh orang luar yang merasa tahu atas permasalahan mereka, walaupun secara riil masyarakat miskin itulah yang sebetulnya merasakan dan tahu persis permasalahan yang dihadapi (Imron dan Manam, 2009).

Menurut Mulyadi (2005), kemiskinan nelayan terdiri atas kemiskinan prasarana dan kemiskinan keluarga. Kemiskinan prasarana dapat diindikasikan pada ketersediaan prasarana fisik di desa-desa nelayan yang pada umumnya masih sangat minim seperti tidak tersedianya air bersih, jauh dari pasar dan tidak adanya akses untuk mendapatkan bahan bakar yang sesuai dengan harga standar. Sementara, kemiskinan keluarga diindikasikan oleh rendahnya tingkat pendapatan keluarga sehingga tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kemiskinan prasarana secara tidak langsung memberi andil munculnya kemiskinan keluarga. Misalnya, ketika air bersih tidak tersedia akan memaksa keluarga untuk mengeluarkan uang untuk membeli air bersih, yang berarti mengurangi pendapatan mereka.

Kemiskinan prasarana juga dapat mengakibatkan kemiskinan keluarga yang berada pada garis kemiskinan (*near poor*) merosot ke dalam kelompok keluarga miskin. Kemiskinan nelayan mengandung kerentanan dan ketidakberdayaan (Mulyadi, 2005). Kerentanan terhadap kondisi darurat seperti ketika terjadi perubahan musim yang sangat ekstrem, nelayan dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki tidak mampu bekerja, dan itu berarti tidak mendapatkan penghasilan. Serta ketidakberdayaan karena tidak mampu keluar dari kemiskinannya akibat terbatasnya keterampilan dan modal yang dimiliki. Modal usaha bagi nelayan antara lain kapal, alat tangkap, bahan bakar, alat pengawet, alat pengolah yang kesemuanya itu tidak sedikit jika dinominalkan.

Kemiskinan nelayan pada umumnya disebabkan beberapa faktor yaitu pendidikan yang rendah, peran lembaga ekonomi yang masih belum optimal memberdayakan nelayan, kebiasaan nelayan yang kurang memperhatikan kepentingan jangka panjang, kepemilikan modal, serta teknologi yang digunakan masih bersifat tradisional (Hamdani, 2013).

Sedangkan menurut (Kusnadi, 2003) menyebutkan bahwa faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan, antara lain:

#### 1. Faktor Internal

Keterbatasan kualitas sumber daya manusia, keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, hubungan kerja (pemilik perahu nelayan buruh) dalam organisasi penangkapan yang kurang menguntungkan bagi nelayan buruh, kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, ketergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut, dan gaya hidup yang dipandang boros serta kurang berorientasi pada masa depan.

#### 2. Faktor Eksternal

Kebijakan pembangunan perikanan yang lebih berfokus pada produktivitas guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sistem pemasaran hasil laut yang lebih menguntungkan perantara, kerusakan akan ekosistem pesisir dan laut karena terjadinya pencemaran dari wilayah darat, penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, penegakan hukum yang lemah terhadap lingkungan,

terbatasnya teknologi pengolahan pasca panen, kondisi alam yang fluktuatif sehingga tidak memungkinkan nelayan untuk melaut sepanjang tahun, terbatasnya peluang kerja disektor non perikanan, terjadinya isolasi geografis kampung nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Menurut Sumodiningrat dan Gunawan (2011) kemiskinan terbagi menjadi 3 bentuk yaitu:

#### 1. Kemiskinan Natural

Jenis kemiskinan ini merupakan keadaan miskin karena dari asalnya memang miskin. Kelompok ini miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai baik sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun sumber daya pembangunan.

#### 2. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan ini disebabkan dari gaya hidup seseorang atau kelompok masyarakat, kebiasaan hidup dan budaya dimana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan serta budaya yang berlaku pada suatu tempat.

#### 3. Kemiskinan Stuktural

Kemiskinan struktural disebabkan karena adanya faktor struktur sosial masyarakat pada suatu wilayah tertentu seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, terjadinya korupsi dan kolusi dalam tatanan ekonomi yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu.

### **2.2.3. Perekonomian**

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah dimanapun. Mayoritas masyarakat miskin merupakan kalangan yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu selain membutuhkan bantuan pemberdayaan, masyarakat miskin juga membutuhkan akses kepada sumber permodalan usaha. Dalam kaitan ini, lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang diakui oleh peraturan yang ada adalah bank



perkreditan rakyat (BPR), koperasi simpan pinjam, koperasi kredit (*credit union*), dan kredit mikro yang dilayani oleh bank-bank besar yang membuka layanan kredit mikro.

Dengan kata lain, mengupayakan pembiayaan bagi usaha mikro akan bermuara pada penanggulangan kemiskinan. Pendanaan bagi usaha mikro merupakan salah satu aspek yang menjadi substansi regulasi dan kebijakan dalam menumbuhkan iklim usaha. Inilah yang diupayakan pemerintah pusat dan daerah untuk memberdayakan usaha mikro secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan di berbagai aspek kehidupan ekonomi. Seluruhnya bertujuan agar usaha mikro memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya. Sejak Inpres Nomor 5 Tahun 2007 tentang Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, hingga lahirnya UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM telah memberikan landasan yang kokoh bagi keberadaan usaha mikro.

Strategi pengentasan kemiskinan di pedesaan harus dikaitkan dengan peningkatan usaha ekonomi produktif dan perbaikan infrastruktur pertanian di pedesaan. Adanya pembinaan usaha tani padat modal yang digalang oleh suatu koperasi nasional di bawah pengelolaan negara diharapkan dapat memperbaiki sistem kelembagaan, sehingga akan menekan angka kemiskinan dan pengangguran. Keberadaan usaha mikro merupakan fakta semangat jiwa kewirausahaan sejati di kalangan rakyat yang bisa menjadi perintis pembaharuan. Menyadari realitas ini, memfokuskan pengembangan ekonomi rakyat terutama pada usaha mikro merupakan hal yang sangat strategis.

Sejalan dengan terus meningkatnya harga kebutuhan pokok masyarakat, garis kemiskinan juga cenderung naik. Garis kemiskinan merupakan nilai pengeluaran minimum atas kebutuhan dasar penduduk berupa makanan dan non makanan. Garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas bagi penentuan status penduduk apakah tergolong miskin atau tidak. Penduduk dikatakan miskin jika nilai pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Makin tinggi garis kemiskinan maka akan semakin banyak penduduk miskin jika tidak diikuti oleh

peningkatan pendapatan. Kondisi terakhir mencatat garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar 4,49% dari Rp471.439,00,- pada bulan Maret 2021 naik menjadi Rp492.620,00,- per kapita per bulan pada September 2021. Jika dibandingkan terhadap kondisi September tahun 2020 telah terjadi kenaikan garis kemiskinan sebesar 7,68% yaitu dari Rp457.495,00,- per kapita per bulan pada September 2020. Kenaikan garis kemiskinan tersebut terutama disebabkan kenaikan pada harga bahan makanan ditengah masyarakat.

Adanya kenaikan harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan dasar penduduk cukup berdampak signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi Lampung. Ditambah dengan merebaknya pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan dampak yang sangat besar terhadap sisi sosial dan ekonomi masyarakat di Indonesia, khususnya daya beli masyarakat. Menurunnya pengeluaran per kapita memberikan indikasi bahwa daya beli masyarakat menurun dan pertumbuhan ekonomi melambat. Tekanan terhadap upaya penanggulangan kemiskinan cukup besar, terlihat dari capaian dan tingkat pertumbuhan komponen pembangunan manusia sisi pengeluaran, yang merupakan pendekatan perkembangan pendapatan masyarakat penurunan drastis. Sebelum pandemi tepatnya tahun 2019, nilai pengeluaran penduduk yang disesuaikan Provinsi Lampung meningkat dengan laju mencapai 2,60%. Memasuki tahun pertama pandemi tahun 2020, nilai pengeluaran yang disesuaikan mengalami penurunan tajam hingga 1,31%.

Perhatian terhadap kawasan pesisir tidak hanya didasari oleh pertimbangan pemikiran bahwa kawasan itu tidak hanya menyimpan potensi sumber daya alam yang cukup besar, tetapi juga potensi sosial masyarakat yang akan mengelola sumberdaya alam tersebut secara berkelanjutan. Potensi masyarakat ini sangat penting karena sebagian besar penduduk yang bermukim di pesisir dan hidup dari pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan tergolong miskin. Kebijakan-kebijakan pembangunan di bidang perikanan (revolusi biru) selama ini ternyata belum mampu meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan (Kusnadi, 2003).

#### 2.2.4. Pendidikan

Pendidikan dan sosial budaya sangat berkaitan erat dimana sistem sosial budaya menjadi bagian dari sistem pendidikan itu sendiri, sehingga permasalahan pendidikan menjadi sangat kompleks. Misalnya masalah mutu pendidikan dan manusia yang ada tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dari mana murid tersebut berasal, serta masih banyak faktor-faktor lainnya. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka untuk menjawab tantangan dunia pendidikan juga menjadi sangat kompleks, menyangkut banyak komponen, serta melibatkan banyak pihak yang terkait agar masalah pendidikan tersebut dapat terselesaikan dengan efektif dan efisien. Dalam upaya mewujudkan manusia berkualitas, dunia pendidikan menghadapi berbagai tantangan yang meliputi aksesibilitas infrastruktur dan fasilitas pendidikan, ekonomi rumah tangga, kualitas pendidikan, terbatasnya sekolah kejuruan, dan lain lain (BPS, 2021).

Menurut Undang-Undang Sistem pendidikan nasional Nomor 20 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia merupakan suatu sistem pendidikan nasional yang diatur secara sistematis. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan sehat. Pemerintah mempunyai program Wajib Belajar 9 tahun. Program ini didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*) yang pada hakikatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk semua anak. Hal ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang tercantum dalam Piagam PBB tentang Hak Asasi Manusia, tentang Hak Anak, dan tentang Hak dan Kewajiban Pendidikan Anak (Prayitno, 2000). Melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan dan keterampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat. Serta dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi baik ke lembaga pendidikan sekolah ataupun luar sekolah.

Selanjutnya akan dibahas tentang pembangunan pendidikan di Provinsi Lampung khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap capaian pembangunan manusia sebagaimana diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Analisis akan disajikan untuk menjelaskan perannya dalam mempengaruhi IPM, tetapi dalam konteks pembangunan secara umum. Indikator yang digunakan merupakan alat ukur yang menunjukkan status pembangunan pendidikan yaitu angka partisipasi sekolah, angka putus sekolah, pembiayaan pendidikan, sarana, tenaga pendidikan, dan lainnya. Telaah yang lebih luas ini diharapkan dapat memberi manfaat lebih jauh, khususnya dalam kaitan kepentingan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan dan sumber daya manusia pada umumnya. Memperluas akses ke pendidikan menengah tidak hanya berpengaruh terhadap tekanan sosial, tetapi ekonomi manusia yang berpendidikan juga akan berpeluang besar mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak.

Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan arah kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu di negara maju sektor ini sangat di perhatikan. Semakin tinggi cita-cita atau taraf kemajuan yang diinginkan, maka akan semakin tinggi pula tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Berdasarkan pengertian sederhana maka pendidikan dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan (Ihsan, 2008).

Dalam kegiatan rumah tangga nelayan tidak hanya suami dan istri saja yang bekerja, tetapi anak-anakpun ikut membantu terutama yang berkaitan dengan kenelayanan. Sebagian anak laki-laki ikut membantu orang tuanya mencari ikan di laut, memperbaiki jaring. Sedangkan anak perempuan, selain membantu ibunya membantu pekerjaan rumah, juga membantu kegiatan yang berkaitan dengan aktifitas nelayan. Hal tersebut mengakibatkan anak-anak keluarga nelayan banyak yang putus sekolah. Selain itu kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya dan masalah ekonomi yang kurang. Di samping itu, kemudahan akses untuk bekerja di sektor perikanan tangkap, tuntutan ekonomi keluarga dan kesulitan dalam mencari peluang kerja lainnya sebagai akibat kegagalan

pembangunan pesisir, telah memperkuat barisan nelayan dengan tingkat kualitas sumber daya yang rendah. Dalam benak pikiran mereka, yang terpenting adalah bisa bekerja (menangkap ikan), dapat penghasilan dan bisa makan setiap hari (Kusnadi, 2003).

Menurut Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1, pada dasarnya jenjang pendidikan (tingkat pendidikan) adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang ingin dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Jenjang Pendidikan seseorang akan mempengaruhi pandangan terhadap suatu yang datang dari luar. Orang yang mempunyai pandangan luas akan memberikan pandangan yang rasional daripada orang yang berpendidikan lebih rendah atau tidak berpendidikan sama sekali. Jadi jenjang pendidikan akan mempengaruhi sikap dan cara pandang seseorang. Dalam Pasal 17 Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar, Pasal 18 Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Menengah, Pasal 19 Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Tinggi, penjabarannya sebagai berikut:

#### a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program 6 tahunan terdiri atas Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtibaniyah (MI), sedangkan bentuk satuan program 3 tahun sesudah 6 tahun adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat (Pasal 7 Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003).

#### b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan menengah kejuruan. Bentuk satuan pendidikan menengah terdiri atas sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah umum adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan masyarakat. Pendidikan

Kejuruan adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan kemampuan masyarakat untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu (Pasal 18 Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003).

### c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister Spesialis, Doktor, yang diselenggarakan pendidikan tinggi disebut Perguruan Tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas (Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003).

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) menyatakan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia, pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab terhadap program tersebut, pasal 6 ayat (1) setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) meskipun dalam bab VII pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 pasal 2 ayat (1) wajib belajar berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara Indonesia, ayat (2) wajib belajar bertujuan memberikan pendidikan minimal bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengembangkan potensi dirinya agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pada jenjang pendidikan yang telah dibahas diatas, pendidikan dasar diselenggarakan selama sembilan tahun untuk bangsa Indonesia. Pada jenjang pendidikan dasar inilah bangsa Indonesia dikenakan wajib belajar. Penyelenggaraan wajib belajar di Indonesia berlangsung selama sembilan tahun yang terbagi pada Sekolah Dasar selama enam tahun dan Sekolah Menengah Pertama selama tiga tahun.

### **2.2.5. Kesehatan**

Keberhasilan atas upaya-upaya dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan. Indikator-indikator tersebut antara lain angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kesakitan, prevalensi balita kurang gizi, dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang proses persalinannya ditolong oleh tenaga medis, persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya, serta rasio tenaga kesehatan per penduduk.

Status kesehatan yang baik akan menjadikan seseorang lebih produktif sehingga mempunyai daya saing dalam bekerja dan memperoleh penghasilan yang layak. Kesehatan yang rendah tidak akan memberikan sumbangan terhadap produktivitas dan daya saing sebagai pekerja. Jika peningkatan kualitas penduduk diabaikan, besar kemungkinan penduduk yang produktif menjadi tidak produktif, bahkan menjadi beban. Bahkan beban ini semakin besar jika yang benar-benar produktif hanya sebagian kecil dari kelompok usia produktif. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlanjut maka akan berdampak pada kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi.

Mengingat kesehatan sangat berperan dalam meningkatkan kualitas manusia, maka menjadi keharusan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang masih terus melingkupinya. Bab ini membahas aspek kesehatan terkait dengan permasalahan dan isu strategis di Provinsi Lampung, khususnya dalam konteks kontribusi kesehatan terhadap capaian pembangunan manusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Meskipun IPM untuk kesehatan hanya diukur dari umur harapan hidup (UHH) dikarenakan indikator kesehatan lain lebih sulit untuk diperoleh datanya, namun perlu juga membahas indikator status kesehatan lainnya dalam rangka meningkatkan umur harapan hidup. Indikator yang akan dibahas berdasarkan hasil eksplorasi data primer survei dan sensus yang dilakukan BPS (Sensus Penduduk, Updating Potensi Desa, Sakernas dan Susenas).

Permasalahan kesehatan masyarakat sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan juga cenderung masih rendah. Tingkat kesehatan masyarakat yang belum merata dan

sangat rendah khususnya terjadi pada masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh. Perilaku masyarakat yang masih tidak higienis ditambah lagi dengan tidak adanya sarana dan prasarana lingkungan yang mendukung berdampak pada kesehatan masyarakat yang tinggal pada pemukiman kumuh tersebut. Banyak masalah kesehatan masyarakat yang mungkin akan timbul akibat perilaku masyarakat akibat dari kondisi lingkungan yang tidak memperhatikan Kesehatan (Mitra, 2012).

Masalah kesehatan merupakan suatu masalah yang cukup kompleks. Hal ini berkaitan dengan masalah-masalah lain diluar kesehatan. Demikian pula pemecahan masalah kesehatan masyarakat. Selain itu, nelayan memiliki risiko kesehatan yang tinggi. Hasil survei sosial dan ekonomi Nasional 2013 menunjukkan bahwa sekitar 25% nelayan mengalami gangguan kesehatan dalam satu bulan terakhir saat disurvei. Selain itu, nelayan yang memiliki jaminan kesehatan hanya 54% (Harmadi, 2014). Banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, baik kesehatan individu maupun kesehatan masyarakat. Status kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh 4 hal yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan dan genetik (Notoatmodjo, 2011).

Wilayah pesisir yang merupakan wilayah yang secara administratif jauh pusat kota memungkinkan terjadinya masalah kesehatan disebabkan oleh akses dan sarana prasarana tidak memadai karena kondisi geografis yang terdiri dari gugusan pulau yang dipisahkan oleh laut. Masalah kesehatan nelayan sampai saat ini masih menjadi perhatian bagi pemerintah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan masih rendah. Tingkat kesehatan masyarakat yang tidak merata dan sangat rendah khususnya terjadi pada masyarakat yang tinggal di pemukiman kumuh.

### **2.3. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan merupakan tindak lanjut dari sebuah program atau kebijakan, sehingga suatu program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan oleh badan-badan administrasi



maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Menurut (Situmorang, 2016) Implementasi kebijakan adalah satu dari sekian banyak tahap kebijakan publik, sekaligus menjadi faktor penting yang memiliki pengaruh sangat besar terhadap keberhasilan kebijakan terkait penyelesaian masalah publik.

Selanjutnya menurut (Agustino, 2012) mendefinisikan Implementasi Kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Dalam arti yang seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang serta menjadi kesepakatan bersama di beberapa pemangku kepentingan (*stakeholder*), aktor serta organisasi (publik maupun privat) prosedur dan teknik secara sinergitas yang digerakkan untuk bekerja sama guna menerapkan kebijakan kearah tertentu yang dikehendaki. Dalam hal inilah pakar seperti Udoji memberanikan diri dengan tegas mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah suatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan (Wahab, 2014). Suatu kebijakan atau program harus terimplementasikan dengan baik agar mempunyai dampak serta tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Proses implementasi dimulai dari peraturan perundang-undangan, diikuti dengan keputusan-keputusan dari instansi pelaksana tentang output-output kebijakan, kepatuhan kelompok sasaran terhadap keputusan-keputusan dari instansi pelaksana tersebut, dampak aktual baik yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, dampak yang dipahami oleh instansi pelaksana, dan akhirnya revisi

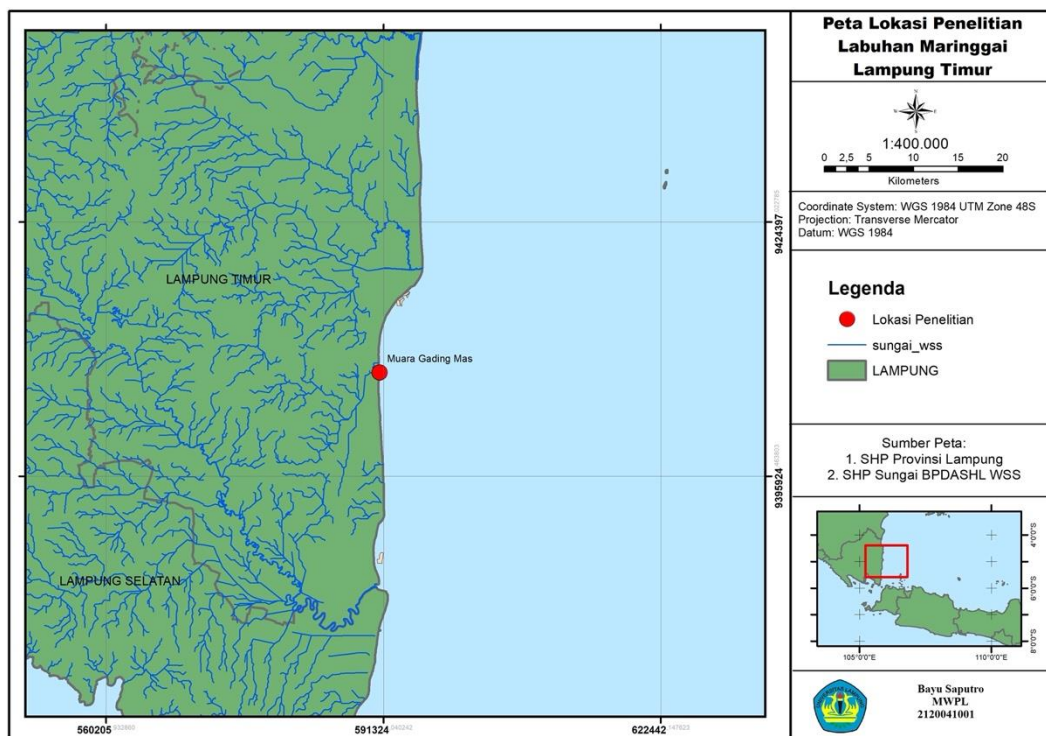
penting ataupun revisi awal dari peraturan perundang-undangan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah tindakan agar sebuah kebijakan dapat dicapai tujuannya. Untuk melihat lebih jauh implementasi kebijakan publik menawarkan dua pilihan langkah yaitu: 1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program- program, 2) melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Suratman, 2017).

Pelaksanaan kebijakan merupakan suatu kegiatan terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Fandi dan Warjio, 2015). Oleh karena itu implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Kekurangan atau kesalahan kebijakan publik akan dapat diketahui setelah kebijakan publik tersebut diimplementasikan, keberhasilan implementasi kebijakan publik dapat dilihat dari dampak yang ditimbulkan sebagai hasil evaluasi atas pelaksanaan suatu kebijakan (Andyaningsih, 2018). Pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan secara tepat sasaran dan berdaya guna akan mampu memecahkan suatu permasalahan secara baik, semakin kompleks permasalahan kebijakan dan semakin mendalam analisis yang digunakan, semakin diperlukan teori dan modal yang mampu menjelaskan ketepatan pelaksanaan kebijakan tersebut (Andyaningsih, 2018).

### III. METODE PENELITIAN

#### 3.1. Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 bertempat di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.



Gambar 2. Lokasi penelitian.

### **3.2. Alat dan Bahan**

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah laptop, kamera dan alat tulis. Bahan yang digunakan yaitu kuisioner yang berisikan karakteristik responden dan pertanyaan tentang kesejahteraan masyarakat berdasarkan kemiskinan yang bermuara pada kebijakan, serta peraturan-peraturan yang berisikan kebijakan pemerintah terhadap hal tersebut.

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan studi dokumentasi mengenai proses implementasi program pemberdayaan ekonomi nelayan serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi tersebut, seperti observasi keadaan geografis dan demografis Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, Lampung, serta wawancara dengan 68 responden yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung Timur, dan nelayan Desa Muara Gading Mas.
2. Data sekunder, adalah data yang bersumber dari data-data sebelumnya yang menjadi seperangkat informasi dalam bentuk dokumen, laporan-laporan, dan informasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan data sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang ada hubungannya dengan proses implementasi program pemberdayaan ekonomi nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur. Data sekunder tersebut meliputi profil desa, sarana prasarana data statistik kemiskinan, dan lain-lain.

### 3.4. Unit Analisis dan Penentuan Informan

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi informan kunci dan responden. Informan yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Timur, aparat Desa Muara Gading Mas dan nelayan Desa Muara Gading Mas. Selain itu, penentuan informan bersifat heterogen untuk menjaga dan mengantisipasi netralnya jawaban informan. Adapun informan penelitian berjumlah 3 orang yang terdiri dari:

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Lampung Timur : 1 orang
2. Aparat Desa Muara Gading Mas : 1 orang
3. HNSI Kabupaten Lampung Timur : 1 orang

Penentuan sampel responden menggunakan rumus Slovin dengan batas toleransi kesalahan yang masih dapat ditolerir sebesar  $e = 15\%$ . Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (2014) bahwa tingkat ketelitian/kepercayaan yang dikehendaki sering bergantung pada sumber dana, waktu/keadaan serta tenaga yang tersedia. Dengan demikian, jumlah sampel berdasarkan perhitungan yaitu sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{1.550}{1 + 1.550 (0,15)^2}$$

$$n = 44,28$$

$$n = 44 \text{ (dibulatkan)}$$

Keterangan:

$n$  = jumlah sampel (Rumah Tangga Perikanan)

$N$  = jumlah kepala keluarga (KK)

$e$  = batas toleransi kesalahan

Jumlah : 44 orang

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Observasi

Teknik ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang dirangkai dalam sebuah kata dan kalimat ilmiah (*scientific word and sentences*) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Selain itu, teknik ini bertujuan untuk mencerna makna dari informasi

dan fenomena yang diperoleh dalam rangka mengungkap serta mendeskripsikan secara utuh dan sistematis tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Nelayan Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur, kemudian dilakukan penelitian.

## 2. Wawancara

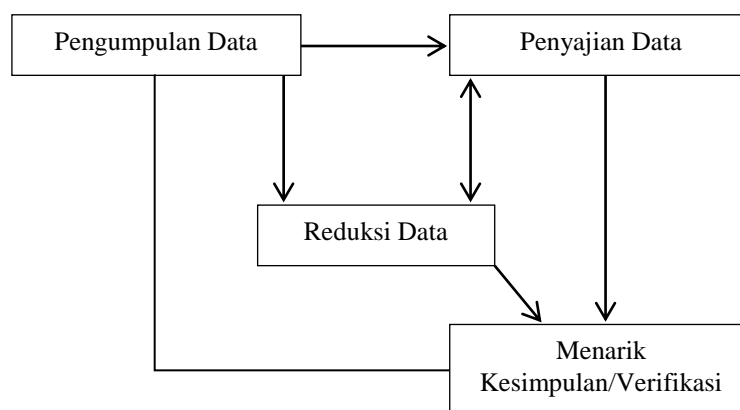
Teknik ini dilakukan dengan mengadakan wawancara mendalam (*indepth interview*) secara langsung terhadap informan yang dianggap dapat memberikan keterangan lebih lengkap dan mampu membahas dengan tuntas mengenai permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini yaitu tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Kesejahteraan Nelayan Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.

## 3. Studi Pustaka dan Dokumentasi

Studi pustaka dan dokumentasi ini diperoleh melalui berbagai bahan bacaan/pustaka berupa buku, media *online*, surat kabar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah serta dokumen lain yang relevan dengan permasalahan pada penelitian.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2017), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Apabila jawaban narasumber belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang diinginkan. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan/verifikasi. Model yang dipakai oleh Miles dan Huberman untuk analisis data disajikan dalam Gambar 3.



Sumber: Sugiyono (2017)

Gambar 3. Teknik analisis data

Dalam memahami model diatas, pertama data yang kita peroleh adalah berupa kata-kata dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari metode pengumpulan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data tersebut dianalisis dimana prosesnya terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

#### a. Reduksi Data

Reduksi data dimaknai sebagai proses memilah dan memilih, menyederhanakan data yang terkait dengan kepentingan penelitian saja, abstraksi dan transformasi data-data kasar dari *field notes* (catatan lapangan). Reduksi data perlu dilakukan karena ketika peneliti semakin lama dikancah penelitian akan semakin banyak data atau catatan lapangan (*field note*) yang peneliti kumpulkan. Tahap dari reduksi adalah memilah dan memilih data yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting, mengelompokan data sesuai dengan tema, membuat ringkasan, memberi kode, membagi data dalam partisi-partisi dan akhirnya dianalisis sehingga terlihat pola-pola tertentu.

#### b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian data. Bentuk penyajian data dalam penelitian kualitatif berupa uraian singkat, bagan, hubungan kausal antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun yang paling sering

dilakukan dalam penelitian kualitatif adalah menyajikan data dalam bentuk teks yang bersifat naratif.

#### c. Menarik Kesimpulan Verifikasi

Langkah terakhir data adalah melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan pola-pola yang sudah tergambar dalam penyajian data, terdapat hubungan kausal atau interaktif antara data dan didukung dengan teori-teori yang sesuai, peneliti kemudian mendapatkan sebuah gambaran utuh tentang fenomena yang kita teliti dan kemudian kita dapat menyimpulkan fenomena tersebut sebagai temuan baru, maka penelitian sudah dianggap selesai.

### **3.7. Triangulasi**

Triangulasi adalah salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut (Sugiyono, 2017) teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggaungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Ada tiga macam triangulasi yaitu:

#### a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sebagai contoh, data dari berbagai sumber tersebut dipilah dan dipilih serta disajikan dalam bentuk tabel matriks. Data dari sumber yang berbeda dideskripsikan, dikategorisasikan mana pandangan yang sama, berbeda, dan mana yang lebih spesifik.

#### b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan cek data dari berbagai macam teknik pengumpulan data. Misal dengan menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Data dari ketiga teknik tersebut dibandingkan adakah konsistensi, jika berbeda dijadikan catatan dan dilakukan pengecekan selanjutnya mengapa data bisa berbeda.



### c. Triangulasi Waktu

Perolehan data dalam waktu tertentu juga memiliki pengaruh yang besar terhadap kredibilitas data. Oleh karena itu, memperoleh data dalam waktu dan situasi yang berbeda perlu dilakukan. Triangulasi dapat dilakukan pada pagi, siang dan malam hari dari sumber yang sama. Atau dari satu hari ke hari yang lain, minggu ke minggu yang berbeda atau bahkan dari bulan ke bulan yang lain. Dari waktu ke waktu tersebut apakah data tersebut berubah-ubah atau menuju konsistensi. Maka konsistensi data merupakan hal yang dituju dalam triangulasi ini.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Simpulan

Hasil analisis menunjukkan bahwa untuk menjadikan kelautan sebagai *leading sector* dalam pembangunan, maka pendekatan kebijakan yang dilakukan Pemerintah Daerah harus mempertimbangkan keterkaitan antar sektor ekonomi dalam lingkup bidang kelautan dan perikanan. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesenjangan akibat tidak terkelolanya dengan maksimal peran dari koperasi dan TPI yang berada di Desa Muara Gading Mas. Selain itu, pola perilaku masyarakat pesisir yang boros harus segera didegradasi secara perlahan sehingga pengelolaan keuangan yang baik turut memperbaiki perekonomian masyarakat sekitar.

Ditemukan problematika pendidikan yang terjadi pada nelayan Desa Muara Gading Mas yaitu tingginya angka putus sekolah yang disebabkan oleh keinginan dari anak nelayan itu sendiri yang tidak ingin melanjutkan sekolahnya lagi, serta adanya pengaruh dari teman yang lebih dulu mengalami putus sekolah dan bekerja sebagai nelayan. Bukan disebabkan karena tidak terpenuhinya fasilitas pendidikan, cara pandang orang tua terhadap pendidikan anaknya, maupun tingkat ekonomi orang tua. Walaupun tingkat ekonomi orang tua rendah tetapi tetap ingin memberikan hal yang terbaik untuk pendidikan anak walaupun orang tua harus hutang dengan pembinanya. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang sudah putus sekolah yaitu anaknya bekerja sebagai nelayan dan kenakalan remaja.

sosialisasi dilakukan secara *door to door* oleh penyuluh kesehatan. Sosialisasi tersebut terkait pemahaman tentang kebijakan terkait dan bagaimana saja prosedur dari fungsi yang diberikan terkait kebijakan Kartu KUSUKA, Dinas

Perikanan melakukan sosialisasi semaksimal mungkin dengan melakukan koordinasi dengan pemerintah kelurahan atau desa terkait. Dalam pelaksanaannya, penyuluh sebagai pelaksana kebijakan di lapangan belum bisa menyampaikan komunikasi yang efektif untuk menggaet pelaku usaha kelautan dan perikanan untuk mendapatkan manfaat dari kartu tersebut.

## **5.2. Saran**

Evaluasi kebijakan perlu dilakukan baik ditataran pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentang indikator kesejahteraan rakyat yaitu tingkat kesehatan, pendidikan dan juga perekonomian. Kolaborasi antar *stakeholder* pun penting untuk dilakukan guna mendorong percepatan pembangunan di wilayah pesisir Desa Muara Gading Mas. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Timur melalui Dinas Kelautan dan Perikanan harus mampu melakukan analisis implementasi kebijakan dan program sesuai dengan kajian teoretis dan praktis yang ada di wilayah pesisir Muara Gading Mas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Amarulloh, A., Surahman, E., Meylani, V. 2019. Digitalisasi dalam proses pembelajaran dan dampaknya terhadap hasil belajar peserta didik. *BIOEDUKASI*. 1–10.
- Andayaningsih, H. 2018. Evaluation of in vitro digestibility of dried matter and organic matter of solid waste of bioethanol fermentation from cassava by trichoderma viride and saccharomyces cerevisiae. *Journal of Asian Scientific Research*. 5(1): 23-29.
- Arkham, M.N. 2018. identifikasi isu dan permasalahan dalam pembangunan pesisir di kawasan teluk Lampung (Sebuah pendekatan sistem sosial ekologi). *Coastal and Ocean Journal*. 4(2): 57-68.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. 2010. *Provinsi Lampung dalam Angka Tahun 2010*. BPS Provinsi Lampung. Bandar Lampung.
- Badan Pusat Statistik. 2007. *Indikator Kesejahteraan Rakyat 2007*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Bebbington, A. 2000. Development is more than just growth. *Development Outreach*. 2(3).
- Budiharsono, S. 2009. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan*. PT Pradnya Paramita. Jakarta.
- Chikmawati, F.N. 2013. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di indonesia (Dalam perspektif perlindungan hukum bagi hak-hak ekonomi masyarakat tradisional). *ADIL: Jurnal Hukum*. 4(2): 396-417.
- Damai, A.A., Boer, M., Marimin, Damar, A., Rustiadi, E. 2012. Analisis prospektif partisipatif dalam pengelolaan wilayah pesisir teluk Lampung *Forum Pascasarjana*. 34(4): 281-296.
- Djunaedi, A., Basuki, M.N. 2002. Perencanaan pengembangan kawasan pesisir. *Jurnal Teknologi Lingkungan*. 3(3): 225-231.
- Fandi, M.I., Warjio. 2015. Implementasi peraturan daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 tahun 2011 tentang Pajak Daerah dalam pencapaian target pajak

- bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*. 6(2): 92-113.
- Fauzi, A. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis, dan Gagasan*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Febryano, I.G., Suharjito, D., Darusman, D., Kusmana, C., Hidayat, A. 2015. Aktor dan relasi kekuasaan dalam pengelolaan mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 12(2): 125-142.
- Fitriansyah, H. 2012. Keberlanjutan pengelolaan lingkungan pesisir melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. 8(4): 48-57.
- Goodwin, J.R. 1990. *Crisis in the World's Fisheries: People Problem and Policies*. Stanford University Press. California.
- Hamdani, H., Wulandari, K. 2013. *Faktor Penyebab Kemiskinan Nelayan Tradisional. Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial*. (Skripsi). Universitas Jember. Jember.
- Harmadi, S.H.B. 2014. *Nelayan Kita*. PT Gramedia Pustaka. Bandung.
- United Nations Development Programme. 1990. *Global Human Development Report*. Human Resources Department.
- Ihsan, F. 2008. *Dasar-Dasar Kependidikan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Imron, M M., Manam, A. 2009. *Strategi Nelayan dalam Peningkatan Kesejahteraan*. LIPI. Jakarta.
- Kadriani, L.H.K., Harudu, L. 2017. Persepsi masyarakat nelayan tentang pentingnya pendidikan formal di Desa Jawi-Jawi Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali. *Jurnal Penelitian Pendidikan Geografi*. 1(2): 1-16.
- Kaunang, R.R., Umboh, J.M.L., Rattu, A.J.M. 2017. Evaluasi pelaksanaan kegiatan pos upaya kesehatan kerja nelayan kaburukan Desa Kematiga di wilayah kerja puskesmas kema Kabupaten Minahasa utara. *Ejournalhealth*. 6(9): 1 -10.
- Kusdiantoro, 2005. Pilpres dan Nasib Nelayan, [http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/30/teropong/lainnya\\_1.htm](http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0804/30/teropong/lainnya_1.htm) diakses 2 November 2022.

- Kusnadi. 2003. *Akar Kemiskinan Nelayan*. LKiS. Yogyakarta.
- Kusnadi. 2003. *Polemik Kemiskinan Nelayan*. Pondok Edukasi dan Pokja Pembaruan. Yogyakarta.
- Kusumaningrum, A. 2013. Kebijakan pembangunan dalam pengentasan kemiskinan masyarakat pesisir. *Agriekonomika*. 2(1): 13-26.
- Kusumastanto, T. 2000. *Perencanaan dan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil*. Makalah, disampaikan pada Lokakarya Pendekatan Penataan Ruang dalam Menunjang Pengembangan Wilayah Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil di Jakarta pada tanggal 10 Oktober 2000. Direktorat Tata Ruang Pesisir, Pantai dan Pulau-pulau Kecil, Ditjen P3K Departemen Perikanan dan Kelautan. Jakarta.
- Kusumastanto, T. 2002. *Reposisi "Ocean Policy" dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia di Era Otonomi Daerah*. Orasi Ilmiah Guru Besar. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Lestari. 2018. *Pengaruh Pendampingan Orang Tua terhadap Hasil Belajar Siswa*. (Skripsi). FKIP Universitas Pasundan. Bandung.
- Lynda. 2009. *Human Well-Being*. Wikiprogress. Jakarta.
- Mardjoeki. 2012. Pemberdayaan masyarakat pesisir pantai utara daerah Kabupaten Cirebon. *Jurnal Ekonomi*. 1(1).
- Misnaniarti., Hidayat, B., Pujiyanto, N.M., Thabrany, H., Junadi, P., Besral., Purwoko, B., Trihono., Vivi. 2017. Ketersediaan fasilitas dan tenaga kesehatan dalam mendukung cakupan semesta jaminan kesehatan nasional. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*. 1(1): 6-16.
- Mitra, M. 2012. *(Masih) Masalah Kesehatan Masyarakat di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka. Bandung.
- Muflikhati, I., Hartoyo., Sumarwan, U., Fachrudin, A., Puspitawati, H. 2010. Kondisi sosial ekonomi dan tingkat kesejahteraan keluarga: Kasus di wilayah pesisir Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumsi*. 3(1): 1-10.
- Mulyadi S. 2005. *Ekonomi Kelautan*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Munparidi. 2010. Pengaruh pendapatan dan ukuran keluarga terhadap pola konsumsi studi kasus Desa Ulak Kerbau Lama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir. *Jurnal Ilmiah*. 2(3): 14-23.

- Nikijuluw, V.P. 2001. Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir serta Strategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan Sumber daya Pesisir Secara Terpadu. *Makalah Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu*. Bogor.
- Nisa, H. 2016. Persepsi masyarakat nelayan terhadap pendidikan tinggi: Studi kasus di Desa Legung Timur Kecamatan Batang-batang Kabupaten Sumenep Madura. (*Doctoral Dissertation*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Indonesia.
- Notoatmodjo, S. 2011. *Kesehatan Masyarakat Ilmu dan Seni*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro. Rineka Cipta. Semarang.
- Pradana, R.S. 2021. Analisis rasio tenaga kesehatan serta kaitannya dengan kualitas kesehatan penduduk Provinsi Aceh tahun 2019. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. 12(1): 1-15.
- Prayitno. 2000. *Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok Dasar dan Profil*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Purnama, N.I. 2016. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Utara. (Tesis). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah. Sumatera Utara.
- Putri, A. E., Trisnaningsih, T., Nugraheni, I. L. 2018. Faktor-faktor penyebab anak putus sekolah jenjang pendidikan dasar. *Jurnal Penelitian Geografi*. 6(5).
- Putro, G., Barida, I. 2017. Manajemen peningkatan kepesertaan dalam jaminan kesehatan nasional pada kelompok nelayan Non Penerima Bantuan Iuran (Non PBI). *Media Litbangkes*. 27 (1) :17–24.
- Ramli, R., Getteng, A. R., Amin, M., Susdiyanto, S. 2017. Perilaku nelayan dalam lingkungan keluarga terhadap pendidikan anak di Desa Tamalate Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. *Jurnal Diskursus Islam*. 5(3): 401-430.
- Reese, S.J. 2003. *Increasing Diabetes Awareness in Adolescents through Educational Programs*. East Tennessee State University.
- Rusastra, I.W., Napitupulu, T.A. 2007. *Karakteristik Wilayah dan Keluarga Miskin di Pedesaan*. Departemen Pertanian. Bogor.
- Sipahelut, M. 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. (Tesis). Institut Pertanian Bogor. Bogor.

- Siswoyo, B.E., Prabandari, Y.S., Hendrartini, Y. 2015. Kesadaran pekerja sektor informal terhadap program jaminan kesehatan nasional di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kebijakam Kesehatan Indonesia*. 4(4): 118–125.
- Situmorang, C. 2016. Kebijakan publik (Teori, analisis, implementasi dan evaluasi kebijakan). Social Security Development Institute (SSDI). Yogyakarta dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. *Jurnal Administrasi Publik*. 6(2): 32-40.
- Sopakua, S. 2008. Kemiskinan dan Ketidakberdayaan Nelayan di Kabupaten Maluku. Bogor.
- Sopyan, Y. 2014. Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai implementasi fikih sosial untuk pemberdayaan masyarakat. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*. 14 (1): 53-62.
- Sudarto. 2011. Pemanfaatan dan Pengembangan Energi angin untuk proses produksi garam di kawasan timur Indonesia. *Jurnal TRITON*. 7(2): 61-70.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumodiningrat, M. Gunawan, M. 2011. *Membangun Perekonomian Rakyat*. IDEA (Institute of Development and Economic Analysis). Yogyakarta.
- Surachman, E. 2011. Problematika pendidikan anak pada keluarga nelayan studi kasus: Desa Marga Mulya, Kecamatan Mauk, Tangerang. *Jurnal Komunitas*. 5(1): 49-56.
- Suratman. 2017. *Generasi Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Capiya Publishing. Yogyakarta.
- Syarief, E. 2001. *Pembangunan Kelautan dalam Konteks Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Majalah PP\Th 2001\Edisi-25 Tenggara Barat.
- Syechalad, M.N., Hardiyanto, R. 2009. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nelayan di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. (2): 106-120.
- Tain, A. 2011. Penyebab kemiskinan rumah tangga nelayan di wilayah tangkap lebih Jawa Timur. *Journal Universitas Muhammadiyah Malang*. 7(1): 01-10.
- Tarigan, I., Suryati, T. 2017. Gambaran *out of pocket* pada awal era JKN di Indonesia *description out of pocket in the early era JKN at Indonesia*. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesehatan*. 1(2): 141–146.



- Tindjabate, C. 2001. *Kemiskinan pada Masyarakat Nelayan: Studi tentang Proses Pemiskinan dan Strategi Bertahan Hidup Masyarakat Nelayan Tradisional di Daerah Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah*. (Disertasi). Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Tulungen, J.J. 2001. *Program Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Terpadu dan Berbasis Masyarakat: Telaah Kasus di Kabupaten Minahasa*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Sulawesi Utara.
- Wagstaff, A. 2010. Measuring financial protection in health. Performance measurement for health system improvement: Experiences, challenges and prospects. *March*. 114–137.
- Wahab, S.A. 2002. *Analisis Kebijakan Negara: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara. Jakarta.
- World Health Organization. 2010. *Stages of Adolescent Development*. World Health Organization. [https://apps.who.int/adolescent/second-decade/section/section\\_2/level2\\_2.php](https://apps.who.int/adolescent/second-decade/section/section_2/level2_2.php) (Diakses pada tanggal 2 November 2022).
- Wibowo, T.A., Kaskoyo, H., Damai, A.A. 2019. Pengembangan wisata pantai mutun terhadap dampak fisik, sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sukajaya Lempasing, Kabupaten Pesawaran, Lampung. *Jurnal Pengembangan Kota*. 7(1): 83-90.
- Zainal, A.S. 2004. *Kebijakan Publik*. Tim Penerbit Yayasan Pancur Siwah. Jakarta.